

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Manan, B. (2019). Nilai-Nilai Dasar Keindonesiaan dan Negara Hukum. Republik Indonesia, hlm. 153

Muhammad Syahrums, S. T. (2022). *Pengantar metodologi penelitian hukum: Kajian penelitian normatif, empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis*. CV. Dotplus Publisher. hlm. 4

Widiarty, W.S., (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media

Suteki, Galang Taufani. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: rajawali pers.

Susanti, D. O., Sh, M., Efendi, A. A., & SH, M. (2022). *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika.

Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.

Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara. hlm. 231

Prakasa, R. S. (2023). *Proses Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 20

Damais, F. (2021). *Hukum Acara Pidana dan Proses Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suparman Marzuki (et.al), *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2005, hlm. 3

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 23

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, cet. 3, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 35

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, 1996.

Jurnal

Annisa, W. R. (2025). Fungsi Hukum Sebagai Instrumen Yang Menjamin Perlindungan Dan Pemenuhan Ham Di Indonesia. *Global Review of Law and Human Rights*, 1(1), hlm. 39

Murthada, M., & Sulubara, S. M. (2022). Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 1(4), hlm. 113

Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), hlm. 175

Rompah, N. V. (2024). Kajian Terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022. *Lex Privatum*, 13(5). hlm. 3

Diputra, S. D. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kasus Kekerasan Berbasis Digital di Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 2(2), hlm. 86

Lestari, WT (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Kriminal Prostitusi Digital yang dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial Melalui Aplikasi. *Seri Prosiding Ilmu Sosial & Humaniora*, 17, hlm. 469

Maharani, N. M., Susanti, E., & Achmad, D. (2025). Politik Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan Bermuatan Seksual (Sextortion) Melalui Media Sosial. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(8), hlm. 3

Putri, M. H., Munawar, A., & Aini, M. (2023). Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(7). hlm. 2

Wibowo, M. S. I., & Munawar, A. (2024). Kendala teknis dan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana siber di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7). hlm. 5

Muhdlor, A. Z. (2012). Perkembangan metodologi penelitian hukum. *Jurnal Hukum dan peradilan*, 1(2), hlm. 199

Prawoko, A., Susilowati, N., Musyaffa, M. I., & Nisa, F. A. H. (2024). Proses Penyelidikan, Penyidikan Dan Wewenangnya Dalam Hukum Acara Pidana. *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(04), hlm. 209

Hasana, E. F. (2024). Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, hlm. 8

- Hasibuan, E. S. (2020). Mengenal Proses Hukum Dalam Kepolisian. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), hlm. 201
- Langi, L. F. (2019). Peran Penyidik Dalam Prapenuntutan Berdasarkan Kuhap. *Lex Crimen*, 8(12). hlm. 7
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), hlm. 62
- Anggoman, E. (2019). Penegakan hukum pidana bagi pelaku kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan. *Lex Crimen*, 8(3). hlm. 62
- Aleng, C. A. (2020). Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal. *Lex Crimen*, 9(2). hlm. 66
- Saefudin, Y., Wahidah, F. R. N., Susanti, R., Adi, L. K., & Putri, P. M. (2023). Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 23(1), hlm. 29
- Lase, F. J. (2018). Karakteristik Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Kabupaten Nias. *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Dan Terluar*, 1(1), hlm. 17
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal yuridis*, 6(2), hlm. 35
- Hadi, N. A. K. (2022). Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), hlm. 228
- Ufran (2019), Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif, *Perspektif Hukum*, Vol.19 No. 2, hlm. 205
- Silaen, F., & Siregar, S. A. (2020). Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), hlm. 13
- Jordy herry Christian, “sektorsi: kekerasan berbasis gender online dalam paradigm hukum Indonesia” *Jurnal Binamulia Hukum*, vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 85
- Subawa, IBG, Saraswati, NPS, Sudiana, AK, & Praditha, DGE (2021). Pertanggung jawaban pidana pelaku dan korban sektorsi kegiatan video call sex (vcs) ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia. *Jurnal Yusthima*, 1 (01), hlm.30
- Sinaga, M. T., Hutabarat, S. N., Bangun, W. B., & Nasution, M. R. H. (2025). Urgensi Kriminalisasi Sektorsi dalam Hukum Pidana Indonesia dalam Kajian Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Perbandingan Internasional. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), hlm. 9653

Pratama, D. A., Soponyono, E., & Sularto, R. B. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan delik kesusilaan dalam pembaharuan hukum pidana. *Diponegoro Law Journal*, 7(4). hlm.446

Hairi, PJ, & Latifah, M. (2023). Implementasi undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Negara Hukum* , 14 (2), hlm. 167

Putri, PAAA, & Sanjaya, DB (2025). Analisis Yuridis Tidak Pasti “Tanpa Persetujuan” Terhadap Kepastian Hukum dalam UU TPKS: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* , 4 (2), hlm. 9967

Fuadi, A. J., & Suprajogi, A. (2025). Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Putusan Nomor: 120 K/Pid. Sus/2021). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), hlm. 2892

Afrida, D. T., & Elda, E. (2023). Sekstorsi Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Delicti: Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 1(1), hlm.18

Taurima, V. A., & Setyawan, D. N. (2025). Korban sekstorsi perspektif Undang-Undang ITE 2024 dan UU TPKS 2022. *Jurnal De Victim*, 1(1), hlm.61

Prawoko, A., Susilowati, N., Musyaffa, M. I., & Nisa, F. A. H. (2024).Proses Penyelidikan, Penyidikan dan Wewenangnya dalam Hukum Acara Pidana. *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(04), hlm. 209

Faris, R. N., & Taun, T. (2024). Keterangan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana: Analisis Objektivitas dan Perlindungan Hukum. *NALAR: Journal Of Law and Sharia*, 2(3), hlm. 237

Fauzah, I. N., Sunardi, S., & Kaimuddin, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge porn) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Dinamika*, 30(1), hlm. 9183

DM, MY, Saragih, GM, Setiawan, F., Sitompul, HI, & Berson, H. (2025). Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Di Indpnesia Dalam Perspektif Teori Lawrence Friedman. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13 (2), hlm. 712

Anggraeni, A., Putri, A. H., & Nainggolan, I. L. (2025). Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Journal of Law and Security Studies*, 2(2), hlm.194

Voges, K. K., Palilingan, T. N., & Sumakul, T. (2022). Penegakan Hukum Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Dilakukan Secara Online. *Lex Crimen*, 11(4) hlm.6

Maharani, NM, Susanti, E., & Achmad, D. (2025). Politik Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan Bermuatan Seksual (Sextortion) Melalui Media Sosial. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15 (8), hlm.40

Sinaga, D., & Lidya, I. (2024). Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (Ite) Dan Uu No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). *Padjadjaran Law Review*, 12(1), hlm.41

Wijayanti, N. S. T. P. L., & Suarya, L. M. K. S. (2023). Fenomena Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Seksual. *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, 7(1), hlm.13

Purba, Y. (2023). Perlindungan hukum bagi korban revenge porn dalam yurisdiksi virtual berdasarkan hukum di Indonesia. *Jurnal sosial dan sains*, 3(11), hlm.1220

Sugiyanto, O. (2021). Perempuan dan revenge porn: Konstruksi sosial terhadap perempuan Indonesia dari perspektif viktimologi. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(1), hlm. 27

Tanti Sri, et al. (2025). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan dengan Modus Sexual Consent di Lampung. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol.2, No.2 hlm. 47

Thesis

Yuanika, F. (2024). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)). hlm. 3

Web

Hakim Jefferson. (2025). "Konsep Penyidik Utama dalam KUHP Baru: Bagaimana Nasib PPNS?". *Hukum Online.com*. Diakses 07 Januari 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/konsep-penyidik-utama-dalam-kuhp-baru--bagaimana-nasib-ppns-lt6927be4b41e80/>